

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini terdiri dari dua bagian yaitu landasan teori dan studi terkait, landasan teori dan studi terkait ini dibuat untuk mendukung dilakukannya penelitian ini. Berikut akan dijelaskan mengenai landasan teori dan studi terkait.

2.1 Landasan Teori

Pada bagian landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah, dan ketenagakerjaan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets (Todaro,2000:144) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh karena adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Menurut Djojohadikusumo (1994) “Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat”. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori dinamika sebagaimana hal itu dapat di kembangkan oleh para pemikir Neo Keynes dan Neo klasik. Sehingga pertumbuhan ekonomi sudah tidak memandang seberapa besar tingkat pertumbuhan atau sektor diluar dari sektor ekonomi itu sendiri. Banyak defenisi

pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonom, berikut akan dibahas beberapa teori pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Pandangan Adam Smith

Proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith di bedakan menjadi dua aspek yaitu pertumbuhan output total dan jumlah penduduk. Berikut akan dijelaskan mengenai pertumbuhan output total dan jumlah penduduk menurut Adam Smith.

1) Pertumbuhan Output Total

Menurut Adam Smith sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut digunakan secara penuh. Sumberdaya insan (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang sangat pasif dalam proses pertumbuhan output. Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat penting untuk menentukan tingkat output.

2) Pertumbuhan penduduk

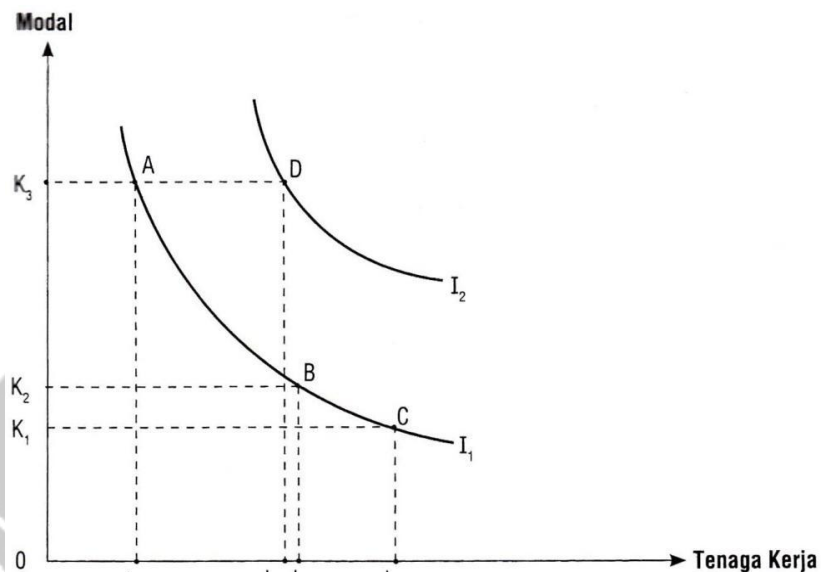
Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Tingkat

upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan akan tenaga kerja akan ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja di tentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

b. Solow-Swan

Pertumbuhan ekonomi neo klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Sollow dan Trevir Swan (Arsyad,2010:61) Pandangan ini di dasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

Dalam teori ini rasio modal-output (*capital-output ratio*=COR) bisa berubah. Dengan kata lain jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu, berikut gambar bentuk Fungsi produksi neoklasik



Gambar 2.1 :
Fungsi Produksi Neoklasik

Sumber: http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/teori_ekonomi_mikro_bab7_fungsi_produksi.pdf.

Dalam fungsi produksi suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan output sebesar I_1 , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain (a) K_3 , dengan L_3 , (b) K_2 dengan L_2 , dan (c) K_1 dengan L_1 , dengan demikian meskipun jumlah modal berubah namun terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan. Sedangkan tingkat output tetap dapat mengalami perubahan meskipun jumlah modalnya konstan. Misalnya, meskipun jumlah modal diasumsikan tidak mengalami perubahan sebesar K_3 , namun jumlah output dapat dari I_1 menjadi diperbesar I_2 jika tenaga kerja yang digunakan bertambah dari L_3 menjadi L_4 .

Teori pertumbuhan neoklasik juga dapat disajikan kedalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas, dimana output merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal. Sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen.

Asumsi yang digunakan dalam model solow-Swan adalah skala pengembalian yang konstan (*constant returns to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap inputnya. Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat digambarkan :

$$Q_t = T_t K_t^a L_t^b$$

di mana :

Q_t = Tingkat produksi pada periode t

T_t = Tingkat teknologi pada periode t

K_t = Skor barang modal pada periode t

L_t = Jumlah tenaga kerja pada periode t

a = Pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b = Pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja.

c. Keynesian (Harrod- Domar)

Teori Harrod Domar merupakan perluasan dari analisis Keynesian mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Dalam teorinya pembentukan modal merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi modal. Pembentukan modal tidak hanya di pandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa jika ada suatu periode tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya

perekonomian tersebut akan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan barang dan jasa. Teori ini juga menganggap bahwa kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian meskipun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan mengalami kenaikan hanya jika terjadi kenaikan pengeluaran masyarakat.

2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematis untuk dapat mengukur sejauh mana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu data yang akurat diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi statistik perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang

memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999: 64).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah selalu di upayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli dari daerah, bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari beberapa komponen antara lain :

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pembangunan daerah. Dari sudut pandang kewenangan pemungutan, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi (pajak provinsi), dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/Kota. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjadi pajak daerah provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Pajak kendaraan diatas air Bea Milik Nama Kendaraan Bermotor (BMNKB).

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air.

Yang termasuk pajak daerah Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha Pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan ke kas daerah.

Retribusi daerah di golongan menjadi tiga yaitu; Jenis retribusi umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jenis retribusi jasa

usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah yang bersangkutan.

3) Hasil kekayaan yang dipisahkan

Sumber PAD lainnya yang sangat penting selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (HAW. Wijaya, 2002).

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang tidak menyalahi aturan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/ jasa oleh daerah.

2.1.3 Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai dalam indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Pengeluaran pemerintah juga dapat diartikan sebagai anggaran yang dikeluarkan

oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan dibidang pengeluaran (Dominggus 2010, hal:30).Pengeluaran pemerintah terbagi atas dua yaitu pengeluaran pemerintah konsumtif (pengeluaran rutin) dan pengeluaran pemerintah non-konsumtif (penegeluaran pembangunan).

2.1.3.1 Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin atau pengeluaran konsumtif pemerintah adalah pengeluaran yang mencakup belanja pegawai, penyusutan maupun belanja barang (termasuk biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran rutin lainnya).

Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses produksi. pengeluaran pemerintah untuk belanja barang tersebut terdiri dari : pembelian alat-alat tulis, barang cetakan dan alat-alat rumah tangga, kantor, sewa gudang dan kantor, biaya pengepakan, pengiriman dan penyimpanan barang, biaya rapat, biaya penerimaan tamu, biaya perjalanan dinas, bunga dan cicilan hutang dan pengeluaran rutin lainnya.

2.1.3.2 Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran pemerintah yang non-konsumtif berbentuk investasi (proyek) baik berbentuk proyek fisik maupun proyek non fisik. Pengeluaran pembangunan terdiri atas ;

- a. Pengeluaran untuk pembiayaan departemen atau lembaga
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah
- c. Penegeluaran pembiayaan lain-lain
- d. Pengeluaran pembiayaan bantuan proyek.

2.1.3.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa teori pengeluaran pemerintah, yaitu menurut Adolph Wagner, WW. Rostow dan RA. Musgrave. Teori Pengeluaran Pemerintah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Teori Pengeluaran pemerintah Wagner

Pengamatan Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa Amerika dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah cenderung semakin meningkat. Hal itu diukur dengan perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuan Adolph Wagner dinamakan “hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri menamakannya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (*Law of ever increasing state activity*).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan (Dumairy, 1997).

2. Teori Pengeluaran pemerintah WW. Rostow dan RA. Musgrave

WW. Rostow dan RA. Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar karena pada tahap awal pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap

diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi swasta juga meningkat.

2.1.4 Teori Penciptaan Tenaga Kerja

Teori penyerapan tenaga kerja lahir sebagai reaksi atas kritik terhadap teori pertumbuhan. Menurut teori ini, dalam kenyataannya dalam penerapan di negara-negara dunia ketiga telah melahirkan pengangguran. Latar belakang pendekatan penciptaan tenaga kerja sebagai revisi teori pembangunan adalah hasil misi kunjungan dan studi badan PBB *International Labour Organization* (ILO) ke beberapa negara seperti Kolombia, Kenya dan Sri Lanka yang ternyata dengan penyerapan teori pembangunan, pertumbuhan di negara-negara tersebut selain mencapai pertumbuhan, juga pada saat yang sama naiknya angka pengangguran. Oleh karena itu disarankan agar kebijakan pertumbuhan haruslah di orientasikan pada penyerapan tenaga kerja (Dionisius Ngana, 2013 :18).

Dalam UU Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki maupun wanita yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan, baik luar maupun dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja terdiri dari :

- 1) golongan yang bekerja dan,
- 2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari :

- 1) golongan yang bersekolah,

- 2) golongan yang mengurus rumah tangga
- 3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan .

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun sampai dengan 64 tahun) yang aktif secara ekonomis. Angkatan kerja terdiri dari :

- 1) penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil mendapatkan pekerjaan
- 2) penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga kerjanya dan belum berhasil mendapatkan pekerjaannya
- 3) penduduk yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja.

2.2 Studi Terkait

Beberapa penelitian sebelumnya akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Domi (2006) telah melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional DIY 1991q1-2001q4. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode *ordinary Least Square* (OLS). Berdasarkan hasil analisis pengolahan data maka diperoleh kesimpulan :

1. Variabel investasi secara individual berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional DIY.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional DIY.
3. Secara bersama-sama variabel investasi dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan regional ekonomi DIY terbukti.

Suryono (2009) dalam penelitiannya mengenai “ Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi, Dan Tenaga kerja terhadap PDRB Jawa tengah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *Ordinari Least Square* (OLS). Berdasarkan hasil analisis pengolahan data maka diperoleh kesimpulan :

1. Adanya pengaruh positif antara tingkat pendapatan asli daerah dengan PDRB Jawa Tengah.
2. Adanya pengaruh positif antara tingkat investasi dengan PDRB Jawa Tengah.
3. Adanya pengaruh positif antara tenaga kerja dan PDRB Jawa Tengah.

Dionisius (2013) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Provinsi NTT”. Menggunakan model regresi Linier Berganda dengan metode *Ordinary Least Squaere* (OLS), dan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pertumbuhan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Manggarai.
2. Pertumbuhan Kredit Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabaupaten Manggarai.
3. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kbaupaten Manggarai.
4. Pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan kredit investasi dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah secara bersama-sama (secara simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabaupaten Manggarai.

Selanjutnya penelitian oleh Najiah (2013) “ Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan tingkat Partisipasi Angkatan kerja terhadap

PDRB di Kota Depok”. Menggunakan metode ordinary Least Square (OLS) dan hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variable PAD, dana perimbangan dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruh pada PDRB kota Depok.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa :
 - a. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB kota Depok.
 - b. Variabel dana perimbangan berpengaruh positif terhadap PDRB kota Depok.
 - c. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB kota Depok.

Penelitian Prakarsa (2014) “ Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus di kabupaten kota Jawa Timur tahun 2008-2012). Metode yang digunakan yaitu dengan metode analisa deskriptif dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini mengatakan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Jawa Timur.
2. Variabel belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
3. Variabel belanja modal berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.